

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan menjadi hak semua Warga Negara di Indonesia, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang. Dikatakan sebagai hak, karena setiap warga negara berhak untuk mendapat serta menempuh pendidikan. Masuknya perihal pendidikan dalam UUD Tahun 1945 menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dan hanya dengan pendidikan kemiskinan dapat dientaskan.

Dalam ayat 3 UUD di atas Pemerintah harus membuat suatu sistem pendidikan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat, dalam hal ini berarti sekolah harus menjadikan hal ini sebagai salah satu tujuan utama dalam menciptakan standar lulusan sekolah. Dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik, saat ini pemerintah dan sekolah sedang gencar mengimplementasikan pendidikan karakter. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.

Pada tataran sekolah dan madrasah, kriteria pencapaian pendidikan karakter adalah terbentuknya budaya sekolah dan madrasah, yaitu perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah atau madrasah, dan masyarakat disekitar sekolah dan madrasah harus berlandaskan nilai-nilai karakter bangsa. Dalam hal ini pendidikan karakter menekankan pada keteladanan, penciptaan lingkungan, dan pembiasaan melalui berbagai tugas keilmuan dan kegiatan kondusif. Dengan demikian, apa yang dilihat, didengar,

dirasakan, dan dikerjakan oleh peserta didik dapat membentuk karakter mereka (Mulyasa, 2013).

Pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab guru agama, guru PKN atau guru yang mengajar tentang moral, tetapi menjadi kewajiban semua guru di sekolah. agar implementasi pendidikan karakter di sekolah dapat berhasil maka syarat utama yang harus dipenuhi diantaranya : (1) teladan dari guru, karyawan, pimpinan sekolah dan para pemangku kebijakan di sekolah, (2) pendidikan karakter dilakukan secara konsisten dan terus menerus, (3) penanaman nilai-nilai karakter yang utama. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter disekolah, semua komponen dan pemangku pendidikan harus dilibatkan. Adapun komponen pendidikan itu meliputi isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan kokurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan dan etos kerja. Di samping itu pendidikan karakter harus dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang berkarakter dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pergeseran paradigma pembelajaran di era revolusi industri 4.0 berpengaruh terhadap pergeseran karakter dan nilai moral siswa akibat kurangnya interaksi siswa secara langsung dengan guru dan teman sebayanya (Suciati et al., 2023). Hal ini menyebabkan siswa kurang menghormati guru, kurang memiliki nilai kepedulian, tidak mempunyai etika, bahkan maraknya perundungan. Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang dihimpun dari Republika, terdapat 16 kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah pada periode Januari hingga Agustus 2023<sup>1</sup>. Selain itu, banyak siswa yang acuh terhadap tugas sekolah akibat penggunaan internet yang gratis dan disalahgunakan, terutama dalam penggunaan media sosial, belum lagi kurangnya perhatian guru dan orang tua terhadap pengembangan karakter dan moral siswa. Penggunaan internet untuk kegiatan belajar siswa usia 5-24 tahun terus meningkat, pada tahun 2020, ada 59,33% siswa yang menggunakan internet, angka ini tumbuh pesat dari 33,98% pada tahun 2016<sup>2</sup>. Beberapa kasus penurunan karakter dan moral di lingkungan pendidikan lainnya

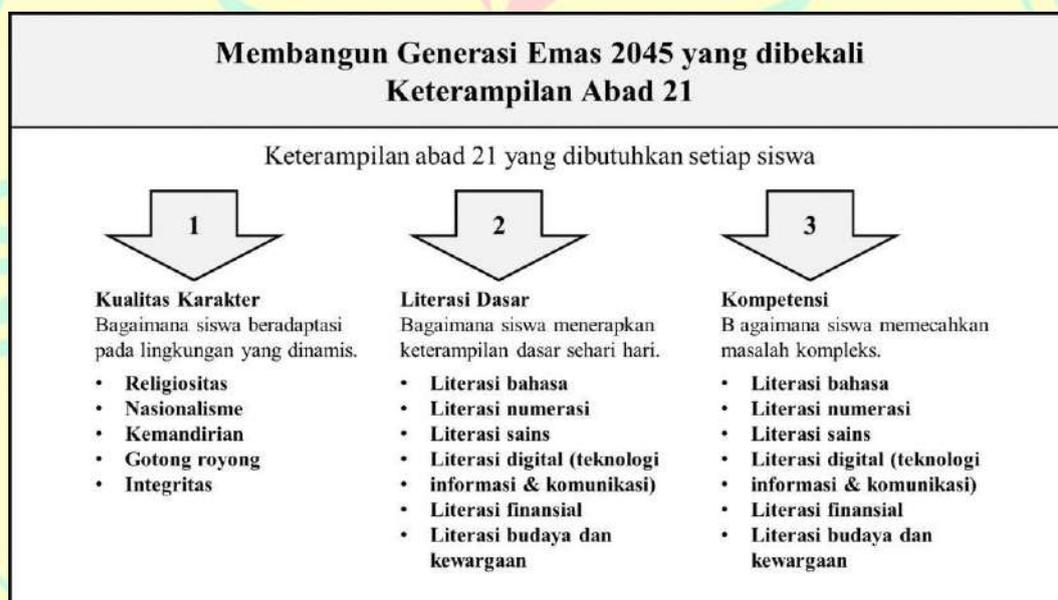
---

<sup>1</sup><https://news.republika.co.id/berita/ryvieve414/ungkap-data-perundungan-di-sekolah-fsgi-imbau-disdik-bentuk-satgas>

<sup>2</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/03/tren-siswa-sekolah-menggunakan-internet-semakin-meningkat>

seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba, telah terjadi peningkatan jumlah dari kalangan pelajar yaitu tahun 2020 sampai tahun 2023, total terlapor 2.650 orang, dan 8,3% merupakan pelajar<sup>3</sup>. Kasus lainnya seperti kekerasan di lingkungan pendidikan, merujuk pada data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 4.683 aduan sepanjang tahun 2022. Dari jumlah itu, 429 aduan terkait sektor pendidikan dan budaya<sup>4</sup>.

Krisis kepribadian bangsa dan melemahnya kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini menjadi sorotan utama pemerintah dalam dunia pendidikan melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental nawacita 8 dan Perpres Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Upaya pemerintah untuk mendorong Lembaga-lembaga Pendidikan dalam menghasilkan generasi emas 2045 menjadi agenda penting yang dapat dilihat pada Gambar I.1.



Gambar I.1 Implementasi Kurikulum Merdeka (Arie Budhiman, 2018)

Untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, kurikulum yang diterapkan berkembang, menyesuaikan dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan perlu dilakukan evaluasi kajian sejauh mana efektivitas penerapan kurikulum. (Indarta et al., 2022) memaparkan pengembangan perbaikan kurikulum akan dikatakan efektif apabila hasil dari pengembangan tersebut sesuai dengan tuntutan

<sup>3</sup>[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/waspada,\\_makin\\_banyak\\_mahasiswa\\_dan\\_pelajar\\_terjerat\\_kasus\\_narkoba](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/waspada,_makin_banyak_mahasiswa_dan_pelajar_terjerat_kasus_narkoba)

<sup>4</sup><https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/20/kpai-indonesia-darurat-kekerasan-pada-anak>

dan kebutuhan, relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Oleh karena itu pengembangan kurikulum hendaknya mempunyai landasan yang kuat, dan berprinsip untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Perkembangan dan tantangan abad ke-21, muncul kebutuhan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan relevan, seperti Implementasi Kurikulum Merdeka yang memberikan fokus yang lebih kuat pada pengembangan karakter siswa, terutama dalam konteks “Kebhinekaan Global. Dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia 262/M/2022, n.d. tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Belajar Pengembangan & Pembelajaran sebagai bentuk dukungan penuh terhadap perbaikan kurikulum di Indonesia mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebhinnekaan global melalui Implementasi Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka sebagai penyempurnaan dari kurikulum 2013 pada tanggal 10 Desember 2019. Selain itu, Pemerintah juga telah meluncurkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sebagai bagian dari upaya penguatan pendidikan karakter. P5 bertujuan untuk membentuk siswa yang memiliki karakter kuat, berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan siap menghadapi tantangan global. Program ini mencakup berbagai aspek seperti gotong royong, kemandirian, kebhinekaan global, integritas, dan lain-lain, yang merupakan elemen penting dalam pendidikan karakter.

Ada 5 nilai utama yang terdapat pada kualitas karakter, yaitu *Religiositas*, Nasionalisme, Kemandirian, Gotong royong, dan Integritas. Berdasarkan agenda tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa pendidikan karakter bukan produk baru, bukan mata pelajaran, bukan kurikulum baru tetapi merupakan penguatan atau fokus dari proses pembelajaran dan sebagai poros/ruh/jiwa pendidikan.

Dari beberapa penelitian sebelumnya terkait pendidikan karakter, terdapat hubungan dan peningkatan yang signifikan antara pendidikan karakter dengan prestasi belajar (Khadijah et al., 2021a). Siswa yang dapat mengembangkan karakter akan memberikan efek positif pada penalaran dan penilaian moralnya, terutama dalam pengambilan keputusan (Van Der Leij et al., 2022). Kekuatan

karakter juga membantu dalam pengaturan diri siswa dalam mengambil sikap dan merefleksikan harga diri yang berdampak positif pada karakter moral siswa yang melibatkan komitmen, kepercayaan diri, dan efikasi diri (Nygreen & Mcdermott, 2021).

Dalam meningkatkan pendidikan karakter dan kualitas pendidikan, sekolah memerlukan sistem manajemen yang memberikan kebebasan sesuai kebutuhan sekolah. Untuk itu, pemerintah telah melaksanakan berbagai program salah satunya memberikan kebebasan kepada sekolah atau pengelola pendidikan untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas. Pemikiran ini disebut dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang telah berhasil mengangkat berbagai masalah pendidikan di beberapa negara maju seperti AS dan Australia. MBS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemberian otonomi pendidikan yang luas kepada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum.

Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. MBS merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. Otonomi diberikan agar sekolah dapat mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi dituntut agar lebih memahami pendidikan dan membantu serta mengontrol pengelolaan pendidikan.

MBS mensyaratkan penyelenggaraan pendidikan dikelola secara mandiri oleh sekolah tersebut. Kepala sekolah dan guru memiliki kebebasan yang luas dalam mengelola sekolah tanpa mengabaikan berbagai kebijakan dan prioritas yang ditetapkan pembangunan nasional. Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan peningkatan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat dan

penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh dari partisipasi orangtua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli sementara masyarakat yang kurang mampu menjadi tanggung jawab pemerintah.

Hasil tinjauan literatur kami menemukan bahwa kepala sekolah adalah bertanggung jawab menerapkan MBS dalam kurikulum pendidikan di sekolahnya dengan mengacu pada delapan standar nasional pendidikan, salah satunya adalah standar isi atau kurikulum berbasis pendidikan tingkat (Permendikbud Nomor 8/2013 tentang Struktur Kurikulum SMP/MTs; dan Permendikbud No. 81A Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kurikulum). Aspek otonomi MBS dalam kurikulum seperti yang dijelaskan pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel I.1 Aspek MBS dalam Bidang Kurikulum

No.	Aspects	Implementation
1.	Autonomy	Forming a curriculum development team, involving elements of school committees and elements of school partners by carrying out their respective roles, schools carry out their authority in preparing curriculum and teaching programs as appropriate in accordance with applicable guidelines and laws and regulations.
2.	Independence	Managing and meeting the needs of school resources, both in terms of teaching staff and education as well as facilities and infrastructure.
3.	Participation	The presence of the school committee was confirmed by the principal's decision letter and was carried out quite well.
4.	Partnership	Collaborating with the business/industry world to be involved in the development of education in schools such as the implementation of industrial work practices.
5.	Transparency	Providing access to information in the form of school websites and providing information boards at schools.
6.	Accountability	The process of administrative accountability reports that are reported periodically to the relevant education office, as well as accountability reporting for activities carried out in activity accountability report meetings.

Sumber : (Amon & Rajib Bustami, 2021)

Untuk melaksanakan MBS maka diperlukan kepemimpinan yang kuat, tim manajemen yang kompak yang dapat bekerjasama mencapai tujuan. Terry (1972) mendefinisikan manajemen sebagai proses yang khas, yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada dan sumber daya lainnya (agus, 2016). Sejalan dengan hal tersebut saat ini manajemen banyak dipahami pada empat aspek yang dikenal dengan istilah POAC (*Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*) lebih jelasnya diuraikan pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel I.2 Fungsi Manajemen

Merencanakan	Mengorganisasikan	Memimpin	Mengendalikan
Mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi dan menyusun bagian-bagian rencana untuk mengkoordinasikan sejumlah kegiatan	Menentukan hal yang harus dilakukan, cara melakukan dan orang yang harus melakukan	Mengarahkan dan memotivasi seluruh pihak yang terlibat dan menyelesaikan konflik	Memantau kegiatan untuk menyakinkan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang direncanakan

Pemikiran Robbin mengenai empat aspek penting dari fungsi manajemen tersebut dapat dimaknai sebagai manajemen *modern*. Dari pemikiran ini diperoleh bahwa pada prinsipnya manajemen *modern* mengaktualisasikan pada tiga persoalan pokok yang harus dilakukan manajer, yaitu bagaimana membuat perencanaan yang mantap, bagaimana melaksanakan kegiatan yang tepat, bagaimana mengawasi kegiatan yang ketat (Afifudin, 2015).

MBS merupakan bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan yang dirintis oleh pemerintah yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia beserta pemerintah daerah, dengan bantuan *The United Nations Children's Fund (UNICEF)*, *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* pada Tahun 1999 telah dinyatakan berhasil pada beberapa sekolah *piloting* (Mustiningsih & Trias Subarkah, 2013). Implementasi program MBS di Indonesia dievaluasi pada tahun 2000, 2002, 2005, dan 2010. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program pembinaan MBS memberikan dampak positif, antara lain: (1) peningkatan manajemen sekolah yang lebih transparan, partisipatif, demokratis dan akuntabel; (2) peningkatan mutu pendidikan; (3) menurunnya tingkat putus sekolah; (4) peningkatan implementasi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan strategi Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM); dan (5) peningkatan peran serta masyarakat terhadap pendidikan di Sekolah Dasar.

Sekolah Islam Harapan Ibu (SIHI) merupakan Lembaga Pendidikan Swasta di Jakarta Selatan yang menerapkan Pendidikan Karakter berdasarkan perspektif Islam sekaligus menjadi tempat untuk penelitian ini. SIHI menaungi beberapa tingkatan sekolah yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam setiap kegiatannya ada nilai-nilai karakter yang ditanamkan pada diri peserta didik, baik dalam kurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Sesuai dengan Visi Misinya,

pendidikan karakter yang diterapkan SIHI berdasarkan Al-qur'an dan Hadits, serta Nabi Mohammad Shalallahu Alaihi Wassalam sebagai *role model*. Selama satu dekade terakhir, SIHI telah berhasil dalam menghasilkan generasi-generasi yang berakhlakul karimah dengan tidak adanya kasus tindak kejahatan serius ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh para siswa-siswinya, baik yang masih aktif ataupun sebagai alumni. Dalam hal ini, SIHI dapat menjadi teladan bagi sekolah-sekolah lain yang memiliki masalah pada penurunan nilai karakter dan moral siswanya.

Faktor lainnya yang membuat peneliti tertarik adalah Sekolah tersebut memiliki sarana prasarana yang lengkap dan tim manajemen yang kuat baik unit TK, SD, SMP sampai SMA. Walaupun banyak hambatan dan rintangan, nyatanya TK SIHI, SD SIHI, SMP SIHI dan SMA SIHI tetap menjalankan aktivitasnya, mampu beradaptasi, mandiri dan inovatif menghadapi tantangan jaman dan persaingan di dunia pendidikan, tetap dipercaya oleh orang tua siswa sebagai tempat menitipkan anaknya untuk didik menurut karakter yang diinginkan, menurut kompetensi yang layak sesuai dengan usia siswa. Hal ini dibuktikan dengan tingginya minat masyarakat sekitar mendaftarkan putra-putrinya di Sekolah Islam Harapan Ibu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala unit SD dimana SD Harapan Ibu memiliki siswa paling banyak dan diminati di daerah Jakarta Selatan menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan yang diterapkan adalah manajemen berbasis sekolah dimana kepala sekolah/kepala unit dan guru diberikan kebebasan oleh yayasan untuk mengelola sekolah sesuai kebutuhan dengan titik berat *outcome* adalah prestasi akademik dan prestasi non akademik yaitu salah satunya pendidikan karakter siswa yang Islami. Otonomi diberikan yayasan agar sekolah dapat mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta tanggap terhadap kebutuhan sekolah. Dalam operasionalnya, setiap perencanaan, kebijakan dan pengambilan keputusan berada di kepala sekolah tidak terpusat di yayasan hal ini mensyaratkan adanya penerapan konsep Manajemen berbasis sekolah di SIHI.

Keunikan lainnya adalah penanaman pendidikan karakter yang diterapkan di SIHI. Sekolah Islam Harapan Ibu sebagai organisasi pendidikan memiliki caranya

dalam membentuk karakter peserta didik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, persepsi, kebiasaan dan kebijakan didalamnya. Hal ini tercermin dari tercermin dari visi dan misi Sekolah Islam Harapan Ibu sebagai berikut :

Visi : Menjadi salah satu institusi pendidikan yang dapat membangun anak didik menjadi manusia yang memiliki pengetahuan dan penguasaan teknologi serta berakhlakul-karimah berdasarkan Al Qur'an dan Hadits.

Misi :

1. Menyelenggarakan mutu pendidikan yang berkualitas dan berwawasan luas;
2. Meningkatkan mutu pendidikan melalui penyelenggaraan proses pendidikan yang utuh (*holistic*);
3. Menerapkan kurikulum nasional dengan memberikan kekuatan pada pembangunan karakter berdasarkan ajaran islam;
4. Menerapkan metode pembelajaran berbasis teknologi informasi (IT)
5. Menerapkan sistem manajemen sekolah berbasis IT, transparan dan bertanggung jawab
6. Mewujudkan sikap kebersamaan dalam semangat ukhuwah islamiyyah serta menjalin Kerjasama secara sinergis dengan pihak terkait dengan pendidikan.

Berdasarkan visi misi tersebut Sekolah Islam Harapan Ibu menjalankan pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku peserta didik secara utuh dengan pendekatan yang dilakukan melalui penyampaian dalam mata pelajaran tertentu/tersendiri. Penanaman pendidikan karakter dapat dilihat dari program pembiasaan yang rutin dilaksanakan disetiap unit/sekolah.

Berbagai keunikan yang peneliti temukan di Sekolah Islam Harapan Ibu Jakarta Selatan menjadi alasan peneliti sebagai tempat penelitian dengan fokus penelitian Manajemen Berbasis Sekolah berbasis pendidikan karakter di Sekolah Islam Harapan Ibu (SIHI) Jakarta Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki 2 tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana implementasi prinsip-prinsip MBS di Pendidikan Karakter (Sekolah Islam Harapan Ibu) saat ini. Kedua, merancang dan mengembangkan model konseptual MBS yang terintegrasi dengan Pendidikan Karakter sekaligus sebagai kontribusi utama penelitian.

## **B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah Implementasi Model Manajemen Berbasis Sekolah Pada Pendidikan Karakter sedangkan yang menjadi sub fokus penelitian ini yaitu:

1. Implementasi aspek otonomi pada pendidikan karakter SIHI;
2. Implementasi aspek independensi pada pendidikan karakter SIHI;
3. Implementasi aspek partisipasi pada pendidikan karakter SIHI;
4. Implementasi aspek kemitraan (*Partnership*) pada pendidikan karakter SIHI
5. Implementasi aspek transparansi pada pendidikan karakter SIHI
6. Implementasi aspek akuntabilitas pada pendidikan karakter SIHI

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi aspek otonomi pada pendidikan karakter SIHI
2. Bagaimana implementasi aspek independensi pada pendidikan karakter SIHI
3. Bagaimana implementasi aspek partisipasi pada pendidikan karakter SIHI
4. Bagaimana implementasi aspek kemitraan (*Partnership*) pada pendidikan karakter SIHI
5. Bagaimana implementasi aspek transparansi pada pendidikan karakter SIHI
6. Bagaimana implementasi aspek akuntabilitas pada pendidikan karakter SIHI

Dari hasil penelitian diharapkan akan terbangun model konseptual implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada pendidikan karakter.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritik**

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori manajemen Pendidikan khususnya dalam lingkup manajemen berbasis sekolah
- b. Sebagai acuan dasar untuk penelitian selanjutnya yang relevan

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi kepala sekolah atau guru SIHI, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan data yang komprehensif bagi Sekolah Islam Harapan Ibu sebagai sekolah dengan fokus pendidikan karakter
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam bentuk implementasi model konseptual MBS pada pendidikan karakter dalam bentuk buku pedoman implementasi MBS pada pendidikan karakter
- c. Bagi penyelenggara (pimpinan/yayasan), penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dalam mengelola sekolah khususnya implementasi sekolah berbasis manajemen pada sekolah karakter
- d. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi dinas agar sekolah diberikan kesempatan mengimplementasikan model implementasi manajemen berbasis sekolah pada pendidikan karakter.

### **E. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum Penelitian**

Untuk menganalisis dan mengkonstruksi implementasi MBS dalam meningkatkan kualitas Pendidikan pada pendidikan karakter Sekolah Islam Harapan Ibu (SIHI).

#### **2. Tujuan Khusus Penelitian untuk menganalisis:**

- a. Implementasi aspek otonomi pada pendidikan karakter di SIHI
- b. Implementasi aspek independensi pada pendidikan karakter di SIHI
- c. Implementasi aspek partisipasi pada pendidikan karakter di SIHI
- d. Implementasi aspek kemitraan (Partnership) pada pendidikan karakter di SIHI
- e. Implementasi aspek transparansi pada pendidikan karakter di SIHI
- f. Implementasi aspek akuntabilitas pada pendidikan karakter di SIHI
- g. Mengkonstruksi model konseptual Implementasi MBS pada pendidikan karakter di Sekolah Islam Harapan Ibu (SIHI)

## F. Kebaharuan Penelitian (*State Of The Art*)

*State of the art* didapatkan dari sebuah kajian literatur tentang hasil-hasil penelitian yang terdahulu dengan melihat sejauh mana ujung ilmu pengetahuan yang sedang dicermati saat ini, atau dengan kata lain, temuan terbaru apa yang telah ada berkaitan dengan yang sedang diteliti saat ini. SotA dapat memberikan peneliti kesempatan untuk lebih cermat dalam melihat variabel-variabel dan hubungannya dengan fokus yang belum disoroti oleh peneliti sebelumnya atau melihat hal-hal yang menjadi gap antara kebenaran ilmiah, kebenaran empiris, serta kebenaran pragmatis sehubungan dengan keilmuan. Pada akhirnya SotA menjadi dasar menuju sebuah novelty dari suatu penelitian. Artinya *Novelty* dapat muncul ketika SotA suatu penelitian memang jelas secara rasional dan logis di awal sebuah desain penelitian. Dengan kata lain, *novelty* tidak akan pernah ada jika eksistensi SotA tidak muncul dalam sebuah rencana penelitian.

Dibandingkan dengan penelitian sejenis yang sudah dilakukan Peneliti terdahulu, penelitian ini mengkaji secara komprehensif implementasi MBS sekolah dalam pendidikan karakter. Secara khusus penelitian diharapkan memberikan kontribusi dalam bentuk “ Model konseptual Implementasi MBS pada pendidikan karakter di Sekolah Islam Harapan Ibu (SIHI), sekaligus membedakannya dengan penelitian terdahulu.

- a. dan kependidikan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Amon & Rajib Bustami, 2021).
- b. Otonomi dalam Pengambilan Keputusan yaitu SIHI memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis yang berhubungan dengan proses pembelajaran, metode pengajaran, dan evaluasi pendidikan, dukungan pendidikan seperti markom dan edutez. Hal ini sejalan dengan penelitian (Amon & Rajib Bustami, 2021).

Dampak Implementasi Aspek Otonomi terhadap Pendidikan Karakter di SIHI adalah bahwa otonomi pendidikan sebagai pemberian kewenangan, hak dan kebijakan pada sekolah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan ciri dan kekhaan sekolah. Yayasan SIHI memberikan kewenangan penyelenggaran pendidikan menjadi tanggung jawab sekolah, sehingga sekolah/unit dapat

mengelola manajemen pendidikan secara independen sesuai dengan kebutuhan dengan tujuan mutu sekolah dapat terjaga.

